

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (OPAC Perpustakaan Nasional RI, (13 Juli 2024)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (13 Juli 2024)
- Latif, Abdul. et al. *Penetapan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Prenada Media, 2021)
- Sandra R. *Negara Hukum* (2022)
- Sjahdeini, Sutan R. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korupsi dan Seluk-Beluknya*. (Depok: Kencana, 2017)
- Yurizal. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (Malang: Media Nusa Creative, 2015)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Universitas Indonesia Library, UI-Press, 2010).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Lamintang. *Kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi : delik-delik khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Arief, Barda N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Kencana Media Group: 2007)
- Hartant, Evi. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional: Cetakan 2*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Bandung: Sinar Baru, 2005.)

Jurnal

- Kristiani, K dan Syaafi, A “Acquittal in Corruption Crime Case at the Palangkaraya Corruption Court.” *International Journal of Judicial Law* 3, no. 3 (1 Januari 2024).
- Taieb, Hamid “Acts of the State and Representation in Edith Stein.” *Journal of Social Ontology* 6, no. 1 (9 Juni 2020).
- _____. “Adjudicating Acts of State.” *Social Science Research Network*, (1 Januari 2013).
- Arif, Ferdinan. “Pengaruh Kedudukan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Independensi Hakim (Studi Kasus di

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang),” (Jakarta: Universitas Andalas, 2018).
- “Article: Legal Certainty in Tax and Customs Judgments of the Court of Justice.” *Ec Tax Review*, (1 April 2024).
- Wibisana, Andi W “Developing the Integrity of Corruption Crime Judges: Evidence in Indonesia.” *International Journal of Research In Business and Social Science*, (18 Desember 2023).
- Furqon, Heryat R, Affandi A, dan Suwanda D “Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Aksi Korporasi Yang Berpotensi Menurunkan Penerimaan Pajak Negara.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 2 (26 September 2022):
- Anjani, Regina dan Setiadi, Edi. “Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Bdg Dan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg).” *Bandung Conference Series Law Studies*, Vol. 3, (2023).
- Faisal. Histori Pemberlakuan Peradilan Agama Era Kerajaan Islam Dan Penjajahan Di Indonesia. *IAIN Langsa*, Vol. 6. (2019).
- _____. “Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (14 Maret 2024).
- Azizbek, Atajanov. “Integration of Modern Information and Communication Technologies as an Important Area of Prevention of Corruption in the Judicial System.” *The American Journal of Political Science Law and Criminology* 04, no. 02 (1 Februari 2022).
- Armantjoneng, Lindawanty S, dan Sptina Christine. “Issues of Legal Certainty after the Issuance of Minister of Manpower Regulation No. 18 of 2022 on Minimum Wage Determination for 2023.” *Journal of Advance Research in Social Science and Humanities*, (9 April 2024).
- Budiman, Maman. *Judgment Freedom Model in Judging Corruption Criminal Cases*, 2021.
- _____. “Kedudukan Hukum Pengadilan Niaga Dalam Kerangka Sistem Kekuasaan Kehakiman.” *Solusi* 21, no. 1 (1 Januari 2023): 46–53.
- Topan O, Fautanu Idzam, Suganda A. “Legal Certainty Advocate Organizational System Arrangements in the Implementation of Professional Quality with the Value of Justice.” *RGSA*, (14 Mei 2024).
- Saputra R, Tioline T, Zaid M, Jaelani Abdul K. “Legal Certainty As An Effort To Protect Customers Peer To Peer Lending Financial Technology In Indonesia.” *KnE Social Sciences*, (3 Maret 2023).
- Sembiring F, Saragih Yasmirah M, *Legal Certainty In Financial Disputes Case*

Resolution Progressive Legal Perspective", (2024).

Faisal Ahmad, "Pemikiran Hukum Progresif Prof Dr. Sadjipto Raharjo",
International Journal of Cross Knowledge Volume 1 Number 2 , (2023)

Mirahadisaputro Moch Arief, Hakim R, Miraharsari A, Anwari, Dahar, "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :21 P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019)", *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 05 No. 8 (Agustus 2022).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*).

Indonesia *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.